

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abraham A, 2011, *Sukses menjadi Artis dengan YouTube*, Reform Media, Surabaya.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Bohari, 2016, *Pengantar Hukum Pajak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Denny Setyawan, 2016, *Rahasia Mendapat Dollar dari Youtube* PT Elax Media Komputindo, Jakarta.
- Fahrizal Alamsyah dan SmitDev Community, 2008, *Easy Money from Internet Meraih Penghasilan dengan Google AdSense*, PT. Elax Komputindo, Jakarta.
- Hadari Nawawi, 1993, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, Yogyakarta).
- Jefferly Helianthusonfri, 2018, *Passive Income dari Google AdSense* (PT Elax Media Komputindo, Jakarta).
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi Dan Informatika, 2019, *Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi Dan Komunikasi Publik Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta.
- Nasrullah, Rulli. Media Sosial, 2015, *Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*. (Simbiosis Rekatama Media, Bandung).
- Neneng Hartati, 2015, *Pengantar Perpajakan, cet. ke-1* (Pustaka Setia, Bandung).
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghalia Indonesia, Jakarta),
- Santoso Brotodiharjo, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Refika Aditama, Bandung).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta)
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, Jakarta).
- Wawan Kuswandi, 1996, *Komunikasi Massa (Sebuah Analisis Isi Media Televisi)*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

B. Jurnal

Edy Chandra, "YouTube, Citra Media Informasi Interaktif atau Media Penyampaian Aspirasi Pribadi", (*Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Oktober 2017).

Ibnu Hajar, "YouTube Sebagai Sarana Komunikasi Dakwah di Kota Makassar", (*Jurnal Al Kitabah, Vol. V No. 2, November 2018*).

Ni Putu Suci Vikansari dan I Wayan Parsa, Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap *YouTubers* Sebagai Pelaku Influencer di Platform Media Sosial YouTube, (Kertha Negara : *Journal Ilmu Hukum, Vol. I No. 3*, 2019).

Nanda Puja Rezky, *KAJIAN KEGIATAN SHADOW ECONOMY DI INDONESIA: SEBUAH STUDI LITERATUR*, (*Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi, Vol.6 Nomor 2, September 2020*).

Suparna Wijaya dan Eka Abid Mahatma, "Analisa Upaya Peningkatan Penerimaan Perpajakan dari Penggalan Potensi Pajak Atas Penghasilan *YouTuber*". (*Jurnal Manajemen Keuangan Publik PKN-STAN, Vol.1, No. 2, 2017*).

C. Internet

Google, "Langkah-langkah untuk menerima pembayaran", <https://support.google.com/adsense/answer/1709858> (diakses pada 06 Juli 2020, pukul 16:31).

Google, "5 *YouTuber* Indonesia Berpenghasilan Tertinggi, Raffi Ahmad Paling Tajir", <https://www.pramborsfm.com/entertainment/5-YouTuber-terkaya-di-Indonesia-juli-2021-siapa-nomor-satu>, (diakses pada 08 Agustus 2021, 18.07).

Fikri Muhammad, "Bagaimana Cara Agar *YouTuber* Indonesia Mau Bayar Pajak?", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190113154724-4-50418/bagaimana-cara-agar-YouTuber-indonesia-mau-bayar-pajak>, (diakses pada tanggal 29 April 2022)

Forbes, "Understanding Influencer Marketing And Why It Is So Effective" <https://www.forbes.com/sites/theyec/2018/07/30/understanding-influencer-marketing-and-why-it-is-so-effective/>, (diakses pada 2 Juni 2022 Pukul 13.00).

Hasil wawancara dengan Linda Sari Hasibuan, CNBC Indonesia sebagai reporter dan Martin Anugrah dan Jovial Lopez sebagai *YouTuber* Indonesia, [Curahan Hati *YouTuber* yang Masih Kebingungan Soal Pajak](https://www.cnbcindonesia.com/news/20190113154724-4-50418/bagaimana-cara-agar-YouTuber-indonesia-mau-bayar-pajak) ([cnbc indonesia.com](http://cnbcindonesia.com)), 13 Januari 2019 12:30.

Hasil wawancara dengan Anggun P. Situmorang sebagai Reporter dan Yustinus Prastowo, Direktur *Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA)* pada pra penelitian, [Ini Alasan YouTuber dan Selebgram Mangkir Bayar Pajak | merdeka.com](#), Senin, 21 Januari 2019 15:07.

Maikel Jefriando, "*Ditjen Pajak : Kami Kejar Google Asia Pacific yang Berkantor di Singapura*",
<https://support.google.com/adsense/answer/1709858> (diakses pada 06 Juli 2020, pukul 16:36).

Millennial, "*Berniat Jadi YouTuber Begini Cara Menghitung Penghasilannya*",
<https://kumparan.com/millennial/berniat-jadi-you-tuber-begini-cara-menghitung-penghasilannya1538050897767799710>
(diakses pada 14 Juni 2020, pukul 20:34).

YouTube, "*Kebijakan mengenai spam, praktik penipuan, dan scam*",
<https://support.google.com/youtube/answer/2801973?hl=id> (diakses pada 25 Februari 2020, pukul 20:35)

YouTube, "*Kebijakan tentang konten yang merugikan atau berbahaya*",
<https://support.google.com/youtube/answer/2801964?hl=id> (diakses pada 25 Februari 2020, pukul 19:05).

YouTube, "*Kebijakan terkait konten kekerasan*",
<https://support.google.com/youtube/answer/2802008?hl=id> (diakses pada 25 Februari 2020, pukul 19:45).

YouTube, "*Kebijakan terkait konten ketelanjangan dan seksual*",
<https://support.google.com/youtube/answer/2802002?hl=id>, (diakses pada 25 Februari 2020, pukul 19:02).

YouTube, "*Kebijakan terkait pelecehan dan cyberbullying*",
https://support.google.com/youtube/answer/2802268?visit_id=1-636215053151010017-1930197662&rd=1&hl=id (diakses pada 25 Februari 2020, pukul 20:11).

DDTC News, "*Dengan Integrasi Data, Ditjen Pajak Dapat Gambaran Tingkah Laku WP*", <https://news.ddtc.co.id/dengan-integrasi-data-ditjen-pajak-dapat-gambaran-tingkah-laku-wp-26058> (diakses pada 02 Juni 2022, pukul 09.00WIB).

Google, "*Understanding Influencer Marketing And Why It Is So Effective*",
<https://www.forbes.com/sites/theyec/2018/07/30/understanding-influencer-marketing-and-why-it-is-so-effective/>, (Diakses pada tanggal 2 Juni 2022 Pukul 13.00 WIB).

Google, "*Apakah Penghasilan Saya Dikenai Pajak?*",
<https://support.google.com/youtube/answer/72902?hl=id#zippy=%2s-Apakah-penghasilan-saya-dikenai-pajak> (diakses pada 1 Juni 2022, pukul 10.00 WIB)

Google, “*Persyaratan dalam menjalankan Program Partner Youtube*”, <https://support.google.com/adsense/answer/72851?hl=id>, (diakses pada tanggal 23 Maret 2019).

Google, “*Ada 204,7 Juta Pengguna Internet di Indonesia Awal 2022*”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022>, (diakses pada 15 Februari 2022, Sumber We Are Social).

Google, “*Ringkasan & Persyaratan Kelayakan Program Partner YouTube*”, <https://support.google.com/YouTube/answer/72851?hl=id>, (diakses pada 29 Mei 2022, pukul 12.00).

Google, “*Pengertian Biaya tetap*”, [Mengenal Biaya Tetap Beserta Contoh & Cara Perhitungannya \(online-pajak.com\)](https://www.online-pajak.com), (diakses pada 31 Mei 2022, Pukul 01.00).

Google, “*Persyaratan Pajak Amerika Serikat untuk Penghasilan YouTube*”, [Persyaratan pajak Amerika Serikat untuk penghasilan YouTube - Bantuan YouTube \(google.com\)](https://www.google.com), (diakses pada 23 April 2021, Sumber *YouTube*).

D. Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85).

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736).

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 4 ayat (3) tentang Perpajakan Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Kerja Pasal 4 ayat (1) tentang Objek Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736).